

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi baik di Indonesia maupun suatu daerah ditujukan berguna untuk kesejahteraan penduduk. Indonesia sebagai sebuah negara di mana pembangunan nasional pada umumnya mempunyai salah satu harapan yakni memajukan kesejahteraan umum. Seperti halnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengatakan bahwasannya Indonesia dibentuk dengan maksud melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

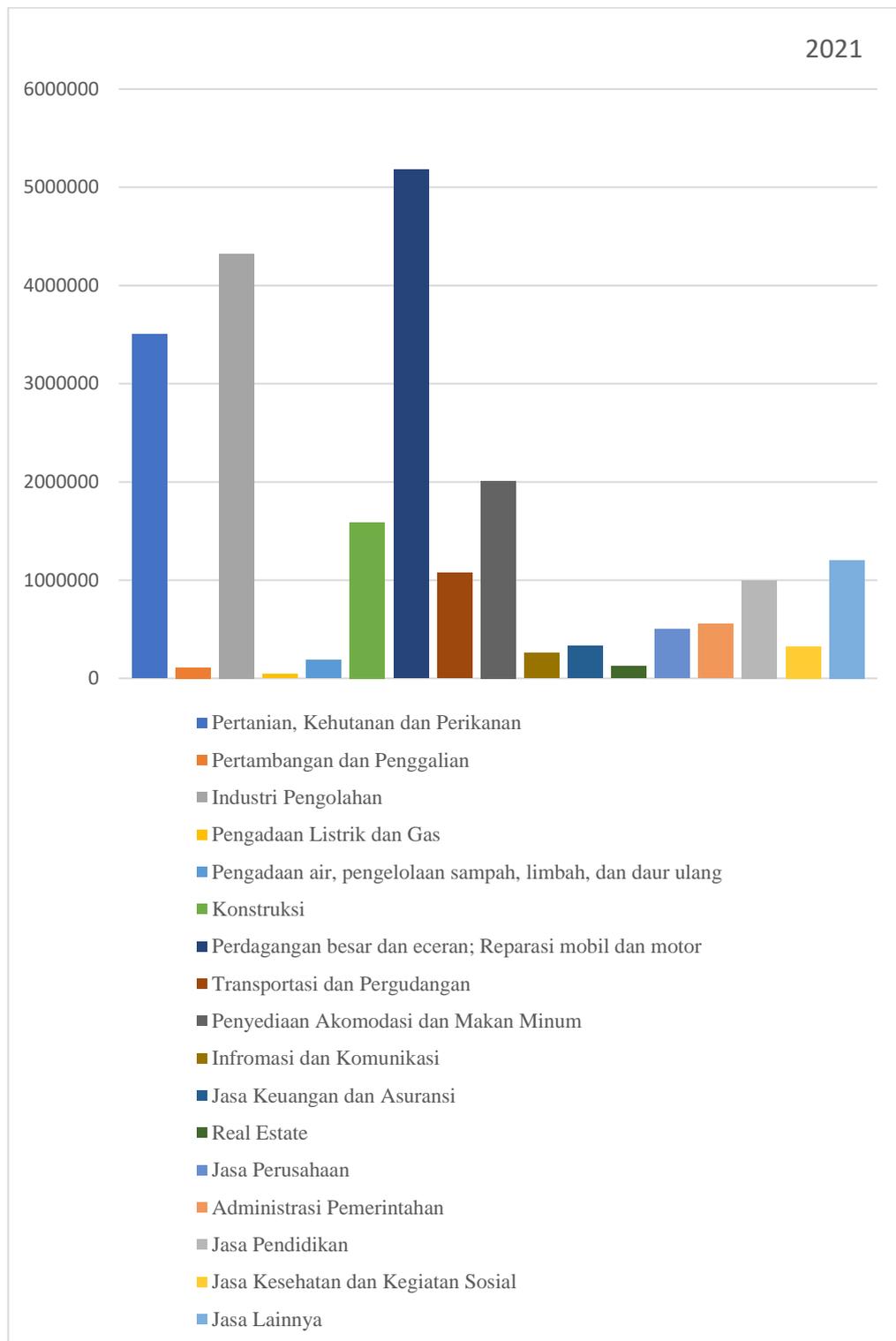
Proses pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Sektor industri dapat memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa nilai keunggulan dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, dan juga kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.

Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi melalui proses industrialisasi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan

kesempatan kerja. Penyediaan kesempatan kerja di Jawa Barat menjadi penting dengan kondisi penduduk yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu cara untuk memperluas kesempatan kerja adalah melalui pengembangan industri terutama industri yang bersifat padat karya. Pengembangan industri tersebut akan menyebabkan kapasitas produksi meningkat sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, kesempatan kerja di provinsi Jawa Barat masih menjadi masalah utama. Hal ini timbul karena adanya kesenjangan atau ketimpangan untuk mendapatkannya. Pokok dari permasalahan ini bermula dari kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja disatu pihak dan kemajuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja di pihak lain.

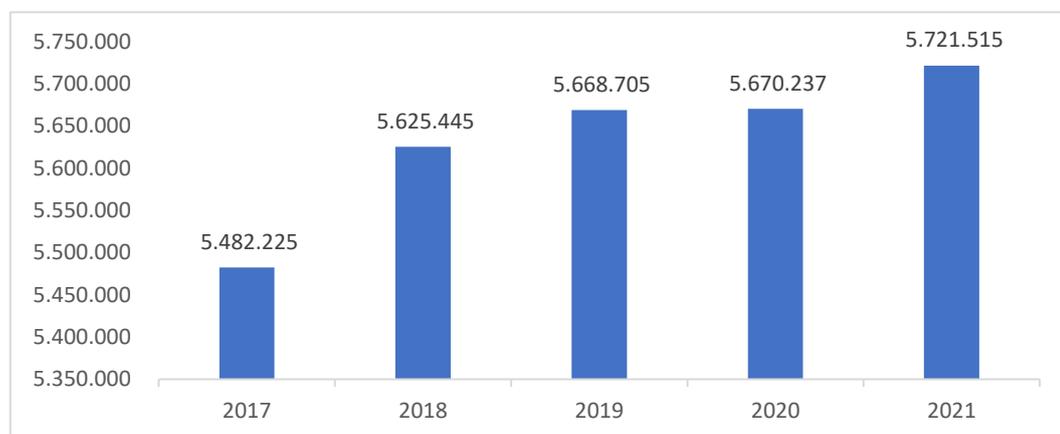
Seperti pada gambar di bawah ini, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor pada tahun 2021 mencapai di angka 5.181.599 orang yang terserap bekerja di sektor tersebut. Sedangkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri lebih tepatnya industri pengolahan yaitu sebanyak 4.323.002 orang. Untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pun hanya mencapai 3.502.834 orang yang terserap bekerja di sektor tersebut.



*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.*

**Gambar 1.1 Tenaga Kerja yang Terserap Semua Sektor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Orang)**

Tenaga kerja adalah hal terpenting dalam aktifitas bisnis dan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan dijalankan bila adanya tenaga kerja yang berkualitas dan handal. Namun, kenyataannya di lapangan masih ada tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan diakibatkan kemampuannya diperkirakan kurang oleh perusahaan itu sendiri. Tenaga kerja yang belum atau tidak memiliki pekerjaan seperti inilah yang dikatakan dengan istilah pengangguran. (Tasyim, 2021).



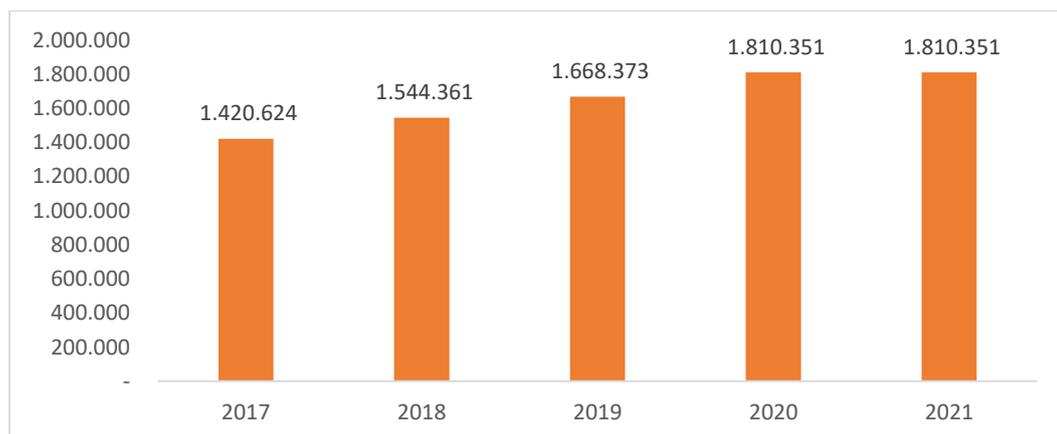
*Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, diolah.*

**Gambar 1.2 Tenaga Kerja yang Terserap Sektor Industri Kecil, Menengah dan Besar di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Orang)**

Berdasarkan gambar 1.2 dari Badan Pusat Statistik, memperlihatkan adanya kenaikan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat secara terus-menerus untuk setiap tahunnya sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 3 juta jiwa kapasitas lapangan pekerjaan. Seperti pada tahun 2017 menunjukkan ada sebanyak 5.482.225 jiwa. Tahun berikutnya, pada 2018 ada sebanyak 5.668.705, tahun 2019 berjumlah 5.668.705. Kemudian tahun 2020 dan 2021 sebanyak 5.670.237 dan 5.721.515 tenaga kerja yang terserap di provinsi Jawa Barat. Banyak faktor yang

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya jumlah penduduk, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Secara makro, ada banyak sekali faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja dalam suatu perekonomian seperti upah minimum provinsi. Meningkatnya upah akan mengakibatkan tingginya biaya produksi perusahaan yang nantinya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Pada dasarnya, setiap konsumen akan memberikan tanggapan yang cepat jika terjadi kenaikan harga barang seperti mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi berminat membeli barang yang diproduksi. Dampaknya banyak produksi barang yang tidak laku, dan produsen harus mengurangi jumlah produksinya. Dengan demikian berkurangnya target produksi menyebabkan turunnya tenaga kerja yang dipergunakan (Hadian, 2018).



*Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, diolah.*

**Gambar 1.3 Upah Minimum di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Rupiah)**

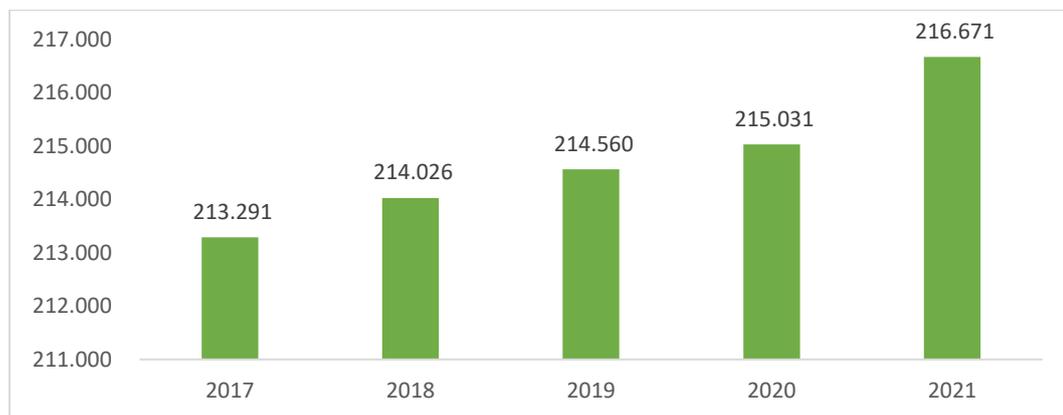
Berdasarkan gambar 1.3 memperlihatkan upah minimum di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Mulai pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1.420.624 hingga pada tahun 2021 mencapai Rp 1.810.351.

Dilihat dari teori tenaga kerja, upah minimum provinsi diposisikan sebagai harga dari tenaga kerja yang di nilai melalui pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ditetapkan upah minimum oleh pemerintah yang harus dibayarkan pengusaha untuk para tenaga kerja guna melindungi para pekerja dari upah yang terlalu sedikit, Dengan demikian, upah diterima akan seimbang sesuai kinerja yang telah mereka laksanakan dan mencukupi standar kehidupan layak.

Ketetapan dalam tingkat upah yang diupayakan oleh pemerintah berguna untuk memberikan pengaruh akan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika tingginya tingkat upah di atas keseimbangan pasar maka mengakibatkan angka penawaran tenaga kerja menaik dan jumlah permintaan tenaga kerja rendah. Dengan demikian dampaknya ialah akan terjadi kelebihan tenaga kerja sebab jumlah pencari kerja lebih besar daripada lapangan pekerjaan yang ada, sehingga kesimpulannya penetapan upah minimum sudah menjadi persoalan ketenagakerjaan yang mendorong kenaikan angka pengangguran di Jawa Barat.

Usaha lainnya dalam menaikkan penyerapan tenaga kerja tidak terhindar dari faktor unit usaha, di mana unit usaha mampu memengaruhi penyerapan tenaga kerja (Septiadi, 2019). Bertambahnya jumlah tenaga kerja bisa disebabkan karena kenaikan jumlah unit usaha. Hal tersebut disebabkan perusahaan mempergunakan sejumlah tenaga kerja dalam menjalankan aktivitas produksi pada usahanya (Soca, 2021). Kenaikan unit usaha akan memberikan pengaruh tingginya penyerapan

tenaga kerja di suatu daerah (Amalia, 2020). Dengan demikian, semakin naiknya unit usaha, maka ketersediaan bagi lapangan pekerjaan juga tinggi sebab semakin dibutuhkan penyerapan tenaga kerja (Septiadi, 2019).



*Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, diolah.*

**Gambar 1.4 Jumlah Unit Usaha di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Unit)**

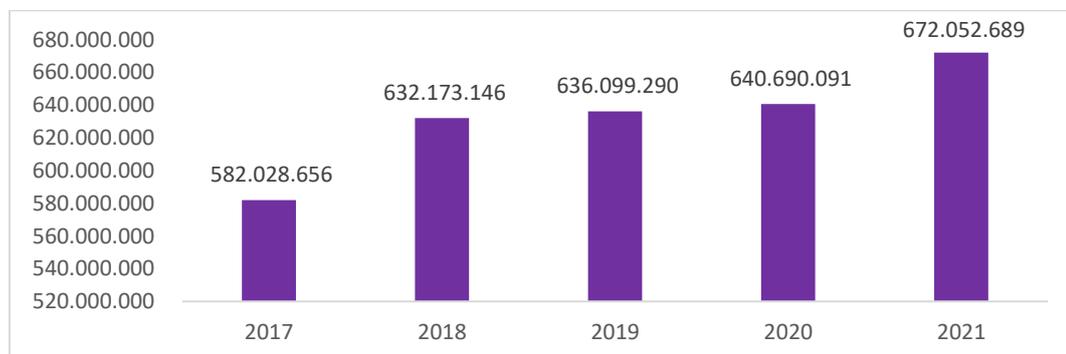
Berdasarkan gambar 1.4 memperlihatkan unit usaha sektor industri di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan tersebut menyebabkan terbukanya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan penyerapan tenaga kerja meningkat.

Saat ini di Jawa Barat cukup banyak perusahaan yang bergerak baik itu perusahaan milik negara ataupun domestik, perusahaan milik swasta atau asing yang beroperasi dalam berbagai sektor baik formal maupun informal. Dengan demikian, banyaknya perusahaan akan memiliki dampak positif yaitu secara tidak langsung diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja maka persoalan pengangguran bisa sedikit teratasi meskipun belum menyeluruh.

Unit usaha ialah salah satu faktor yang berperan penting guna penyerapan tenaga kerja. Banyaknya unit usaha memiliki keterkaitan sangat kuat dalam

penyerapan tenaga kerja. Sebab, unit usaha mampu memberikan kontribusi sumber pendapatan yang tinggi dan juga mempunyai peran strategis dalam mendorong usaha.

Selanjutnya, untuk mengembangkan sektor industri perlu adanya investasi yang memadai agar pengembangan sektor industri dapat berjalan sesuai tujuan. Usaha akumulasi modal dapat dilakukan dengan melalui kegiatan investasi yang akan menggerakkan perekonomian melalui mekanisme permintaan agregat, dimana akan meningkatkan usaha produksi dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan permintaan tenaga kerja. Penanaman modal pada suatu wilayah yang membaik bisa meningkatkan penanaman modal sehingga mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja (Adi, 2020).



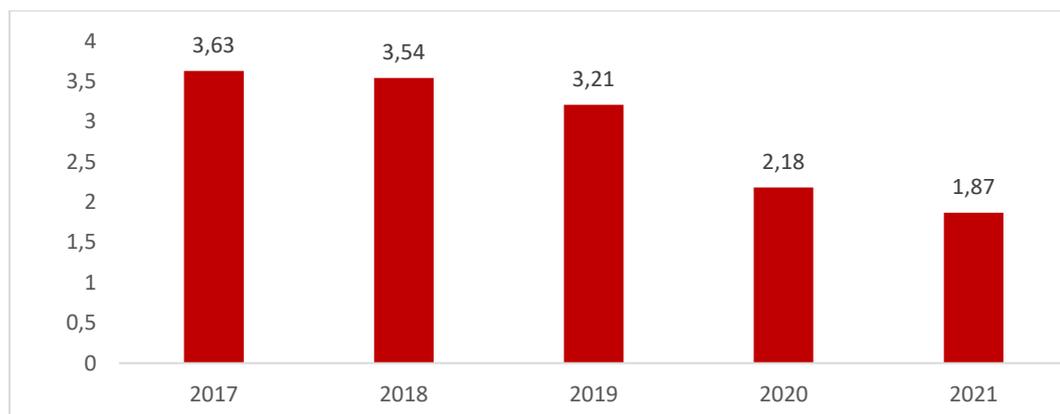
*Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, diolah.*

### **Gambar 1.5 Investasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Rupiah)**

Berdasarkan gambar 1.5 memperlihatkan investasi di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Jika adanya penambahan investasi maka perusahaan bisa semakin berkembang yang mengakibatkan butuhnya tenaga kerja baru. Dari banyaknya provinsi yang ada di Indonesia, provinsi Jawa Barat selalu menjadi peringkat utama dan cenderung naik dalam hal investasi dan penanaman

modal dalam negeri sejak tahun 2020 sampai 2022. Dengan demikian, Jawa Barat dianggap sebagai daerah yang paling menjanjikan bagi investor asing dan dalam negeri untuk menempatkan dananya. Akan tetapi, nilai investasi yang selalu baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia tidak membuat Jawa Barat turut memiliki prestasi yang baik dalam hal penyerapan tenaga kerja (Hidayati, 2022).

Selain itu, faktor lain yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja ialah inflasi. Perubahan angka inflasi akan menyebabkan hasil produksi dan memengaruhi sebuah perusahaan untuk menambah ataupun mengurangi jumlah tenaga kerja mereka.



*Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, diolah.*

#### **Gambar 1.6 Inflasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (%)**

Berdasarkan gambar 1.6 memperlihatkan inflasi di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Harga barang yang meningkat saat terjadinya inflasi ialah karena keterbatasan barang tersebut dalam memenuhi semua permintaan sehingga memicu peningkatan dalam hasil produksi. Hasil produksi yang lebih tinggi akan membuat produsen untuk menambahkan faktor produksi, salah satunya yakni tenaga kerja. Hal tersebut diakibatkan karena perusahaan-

perusahaan membutuhkan lebih banyak pekerja saat memproduksi hasil barang dan jasa yang lebih besar sehingga penyerapan tenaga kerja akan meningkat.

Dari hasil penjelasan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh upah minimum, jumlah unit usaha, investasi dan inflasi dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang paling mendominasi dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri di Jawa Barat, dengan demikian peneliti mengambil judul **“Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Jumlah Unit Usaha, Investasi dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2021”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka identifikasi masalah penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi, jumlah unit usaha, investasi dan inflasi secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Jawa Barat tahun 2006-2021.
2. Bagaimana pengaruh pengaruh upah minimum provinsi, jumlah unit usaha, investasi dan inflasi secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Jawa Barat tahun 2006-2021.
3. Bagaimana elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Barat terhadap upah minimum provinsi, jumlah unit usaha, investasi dan inflasi tahun 2006-2021.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi, jumlah unit usaha, investasi dan inflasi secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi, jumlah unit usaha, investasi dan inflasi secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2021.
3. Untuk mengetahui elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Barat terhadap upah minimum provinsi, jumlah unit usaha, investasi dan inflasi tahun 2006-2021.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Penelitian ini ditemukan bukan hanya untuk penulis saja, melainkan dipergunakan untuk antara lain:

1. Penelitian ini dibuat guna menerapkan ilmu dan teori yang didapatkan selama di perkuliahan.
2. Selain itu, sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan menjalankan laporan serupa ataupun lanjutan di bidang ilmu ekonomi.
3. Hasil daripada penelitian yang penulis temukan ini ditujukan mampu menyampaikan informasi, referensi maupun wawasan ilmu pengetahuan seperti bertambahnya bukti empiris sehingga bisa terdapat manfaat kepada pihak manapun yang membutuhkan penelitian ini kedepannya.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini sebagai kesempatan bagi mahasiswa/mahasiswi untuk mampu terjun langsung ke lapangan dan mendapatkan pengetahuan serta ilmu praktis terkait pengaruh upah minimum, unit usaha, investasi dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja ataupun temuan variabel lainnya.

## 1.5 Lokasi dan Jadwal

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Studi kasus dalam penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat untuk menemukan bagaimana pengaruh upah minimum provinsi, jumlah unit usaha, investasi dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri mulai tahun 2006-2021.

### 1.5.2 Jadwal Penelitian

Perkiraan waktu penelitian dilakukan mulai dari Januari-Juni 2023 seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Jadwal Penelitian**

No.	Jenis Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■	■																						
2	Penyusunan penelitian			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
3	Seminar proposal													■	■										
4	Revisi proposal													■	■	■	■								
5	Analisis data																	■	■						
6	Penyusunan skripsi																					■	■	■	■
7	Sidang Skripsi																								■